BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) belum efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Hal tersebut dapat dilihat pada:
   - Aspek perencanaan masih menghadapi beberapa kekurangan utama, yaitu rendahnya kapasitas sumber daya manusia desa dalam memahami teknis aplikasi, keterbatasan literasi digital, serta belum meratanya pelatihan dan pendampingan teknis. Selain itu, masih terdapat partisipasi masyarakat yang terbatas dalam forum perencanaan (Musyawarah Kampung) yang berdampak pada ketidaksesuaian antara kebutuhan lokal dan program yang direncanakan.
   - Aspek pelaksanaan masih menghadapi sejumlah kekurangan krusial, seperti rendahnya kapasitas SDM kampung dalam pengoperasian sistem, keterbatasan infrastruktur teknologi (listrik, internet, perangkat), serta lemahnya mekanisme pengawasan berbasis bukti fisik. Selain itu, Siskeudes cenderung berfokus pada pengendalian administratif, tanpa mampu memverifikasi kesesuaian antara input sistem dan

realisasi kegiatan di lapangan, sehingga menciptakan *implementation gap*. Serta minimnya monitoring berbasis output menegaskan perlunya penguatan kapasitas teknis, revisi prosedural, serta integrasi antara kontrol sistem digital dan verifikasi lapangan yang berbasis kinerja.

- Aspek penatausahaan masih diperhadapkan dengan rendahnya kapasitas SDM, ketergantungan pada satu operator, minimnya partisipasi dalam pelatihan, serta kurangnya sarana dan infrastruktur pendukung. Selain itu, kedisiplinan pencatatan dan ketepatan waktu input data masih menjadi tantangan, yang berpotensi mengganggu integritas data keuangan.
- Aspek pelaporan masih menghadapi sejumlah kelemahan mendasar, terutama terkait rendahnya kapasitas SDM, keterlambatan input data, ketidakakuratan pelaporan, serta kurangnya integrasi pelaporan sebagai bagian dari manajemen keuangan yang substansial. Ketergantungan pada satu operator dan minimnya pelatihan memperburuk kualitas data yang dihasilkan.
- Aspek pertanggungjawaban masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek kedisiplinan input data, kelengkapan bukti fisik, keterbatasan pemahaman perangkat kampung terhadap regulasi, serta lemahnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Ketergantungan pada intervensi

eksternal (pelatihan, pendampingan) dan belum optimalnya digitalisasi dokumen juga menjadi hambatan signifikan.

2. Faktor penghambat implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong adalah:
   - Lemahnya koordinasi yang mengakibatkan ketidakterpaduan antaraktor, baik vertikal maupun horizontal sehingga menyebabkan tumpang tindih peran, keterlambatan pelaksanaan program, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi.
   - Proses verifikasi yang lambat yang diakibatkan keterbatasan kapasitas SDM, keterlambatan pelaporan, ketergantungan pada operator, serta lemahnya sistem monitoring dan integrasi data sehingga menghambat kelancaran pencairan dana, pelaksanaan program, dan pengambilan keputusan yang tepat waktu.
   - Rendahnya komitmen akibat keterbatasan teknis dan infrastruktur seperti belum meratanya kapasitas SDM, kurangnya pembinaan berkelanjutan, serta kendala eksternal seperti gangguan jaringan yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh kebijakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Agar implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Distrik Aimas Kabupaten Sorong lebih efektif, sebaiknya:
    - Pada aspek perencanaan perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis berbasis modul yang disesuaikan dengan tingkat literasi digital aparat kampung. Melakukan rekrutmen fasilitator lokal yang memahami konteks budaya dan bahasa setempat sehingga dapat membantu dalam proses pendampingan. Partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Kampung (Muskam) juga harus diperkuat melalui metode *community mapping* dan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk memastikan kebutuhan masyarakat terakomodasi dalam perencanaan program.
    - Pada aspek pelaksanaan, diperlukan penyediaan infrastruktur dasar seperti listrik, koneksi internet, dan perangkat komputer di setiap kampung. Penguatan kapasitas juga harus mencakup pelatihan bagi operator cadangan guna menghindari ketergantungan pada satu orang. Memperkuat pengawasan internal dengan membentuk tim monitoring berbasis komunitas yang dilatih secara sederhana namun fungsional.
    - Pada aspek penatausahaan, diperlukan pembentukan tim keuangan kampung yang terdiri atas bendahara, sekretaris, dan satu anggota tambahan sangat penting untuk membagi beban kerja dan memperkuat akuntabilitas. Menyiapkan

pendampingan teknis secara rutin dan terjadwal di tingkat distrik agar membantu menjaga kontinuitas administrasi keuangan.

- Pada aspek pelaporan memerlukan penyederhanaan format melalui template visual dan dashboard otomatis yang memudahkan penyusunan laporan. Integrasi fitur validasi otomatis sangat membantu mendeteksi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi.
- Pada aspek pertanggungjawaban diperlukan sistem digitalisasi dokumen pendukung seperti faktur, berita acara, dan dokumentasi kegiatan yang dapat diunggah langsung ke dalam aplikasi. Keterbukaan informasi publik juga dapat ditingkatkan melalui penyusunan ringkasan keuangan kampung dalam bentuk infografis yang dipublikasikan di papan pengumuman atau media sosial desa. Pembentukan tim satgas untuk memperkuat pemahaman perangkat kampung terhadap regulasi.

2. Untuk meminimalisisr atau fFaktor penghambat implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong, maka sebaiknya:
   - Membentuk forum koordinasi dengan melibatkan kepala kampung, operator Siskeudes, pendamping desa, dan dinas teknis sangat penting untuk menyelaraskan agenda kerja serta menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) koordinasi yang membagi

peran secara jelas serta jadwal pelaksanaan forum koordinasi tersebut setiap triwulanan.

- Membentuk tim pendukung operator kampung yang terdiri atas dua hingga tiga orang lalu mengikutkan dalam kegiatan pelatihan berbasis tugas nyata, dengan pendekatan simulasi penggunaan aplikasi dan studi kasus lokal. Selanjutnya, membuat sistem pelaporan dan verifikasi berbasis aplikasi seluler yang mampu mengunggah bukti fisik kegiatan (dengan fitur geo-tag dan timestamp) sehingga membantu percepatan dan keakuratan pelaporan. Membuat jadwal kegiatan supervisi lapangan secara rutin oleh pendamping atau pengawas teknis untuk memastikan kesesuaian antara data di sistem dan kondisi riil di lapangan.
- Diperlukan komitmen pimpinan untuk mengalokasikan anggaran pelatihan berkelanjutan bagi operator dan seluruh perangkat kampung terkait peningkatan tupoksinya. Selanjutnya, pengadaan kperangkat komputer, modem berbasis satelit, dan genset portabel untuk kampung yang belum terjangkau listrik dan jaringan stabil.

C. Produk Tesis

Hasil penelitian ini akan disusun menjadi bahan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence based policy*). Oleh karena itu, hasil penelitian ini akan disusun menjadi *policy brief* untuk merangkum temuan-temuan utama secara ringkas, sistematis, dan aplikatif agar dapat digunakan sebagai

dasar pengambilan keputusan oleh pemangku kebijakan terkait efektivitas pengelolaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Distrik Aimas Kabupaten Sorong.